

LAPORAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING



HARMONISASI JARINGAN SOSIAL
SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

Tahun Kedua Dari Rencana dua Tahun

Ketua Tim/Anggota

Dr. Ismet Sulila, SE, M.Si (00180378002)

Drs. Rusli Isa, M.Si (0006076604)

Sainudin Latare, S.Pd., M.Si (0010087509)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

JULI 2014

LAPORAN

PENELITIAN HIBAH BERSAING



**HARMONISASI JARINGAN SOSIAL
SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

Tahun Kedua Dari Rencana dua Tahun

Ketua Tim/Anggota

Dr. Ismet Sulila, SE. M.Si (00180378002)

Drs. Rusli Isa, M.Si (0006076604)

Sainudin Latare, S.Pd., M.Si (0010087509)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

JULI 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Harmonisasi Jaringan Sosial Sebagai Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Publik di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : Dr. ISMET SULILA SE., M.Si
NIDN : 0018037802
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Administrasi Perkantoran
Nomor HP : 085340024000
Surel (e-mail) : ismet.sulila@gmail.com

Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : Drs RUSLI ISA M.Si
NIDN : 0006076604
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO


Anggota Peneliti (2)
Nama Lengkap : SAINUDIN LATARE S.Pd., M.Si
NIDN : 0010087509
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 40.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 80.000.000,00

 Mengetahui
Dekan FEM

(Amran R. Hambali, S.Pd, SE, MSA)
NIDN/NIK. 107008271000021001

Gorontalo, 21 - 11 - 2014,
Ketua Peneliti,


(Dr. ISMET SULILA SE., M.Si)
NIDN/NIK

ABSTRAK

Penelitian tahun kedua ini sebagai kajian yang lahir berdasarkan kelanjutan penelitian tahun pertama tentang situasi sosial masyarakat di Kabupaten Boalemo yang majemuk terdiri dari berbagai suku termasuk suku Gorontalo sebagai suku asli yang mendiami daerah ini. Harmonisasi jaringan sosial sebagai faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Kabupaten Boalemo tahun pertama telah menghasilkan kajian interkai jaringan sosial di Kabupaten Boalemo, yang dirinci dalam beberapa kajian yang meliputi: kajian komprehensif kelompok sosial dan jaringan sosial di Kabupaten Boalemo, kajian pemetaan seluruh kelompok sosial dan jaringan sosial di Kabupaten Boalemo dan kajian terhadap faktor pendukung dan penghambat harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama di atas, maka pada tahun kedua ini tim peneliti telah melanjutkan penelitian yang difokuskan pada dua kajian, fokus pertama yaitu bagaimana mewujudkan harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo berdasarkan faktor pendukung dan penghambat, dan fokus kedua yaitu bagaimana model harmonisasi jaringan sosial yang dapat mendukung pelayanan publik di Kabupaten Boalemo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor pendukung harmonisasi jaringan sosial dapat diimplementasikan secara bersamaan melalui beberapa konsen implementasi harmonisasi jaringan sosial sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan laporan ini. Fokus masalah kedua menghasilkan sebuah hasil kajian berupa konsep model harmonisasi jaringan sosial yang dapat digunakan di wilayah ini atau di wilayah lainnya yang memiliki situasi sosial atau karakteristik sosial yang persis sama dengan wilayah ini. Adapun hasil kajian pemetaan dapat dilihat pada bagian hasil penelitian dan pembahasan dalam laporan penelitian ini.

Dalam melaksanakan kajian, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang akan dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di masa reformasi banyak diwarnai oleh tuntutan terhadap pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan lebih otonom dan terdesentralisasi, ketimbang dengan paradigma lama yang semuanya serba terpusat dan dibawah kendali langsung dari pemerintah pusat. Dalam konteks ini, konsep desentralisasi secara populer diartikan sebagai pemberian/mendelegasikan wewenang dari atasan (pemilik wewenang) kepada bawahan (pelaksana). Sementara itu otonomi mengandung makna kemandirian. Mandiri dalam konteks ini adalah kebebasan untuk memilih dan menyelenggarakan pemerintah yang disertai dengan kemampuan. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah tersebut telah menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1997, bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan kualitas pelayanan. Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan